



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**“Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 361
Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi di SMAN X Kota
Bandung”**

Skripsi

Oleh

Tanty Tresnasari

2013310044

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**“Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 361
Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi di SMAN X Kota
Bandung”**

Skripsi

Oleh

Tanty Tresnasari

2013310044

Pembimbing

Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si.

Bandung

2017



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Tanty Tresnasari
Nomor Pokok : 2013310044
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 361
Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi di SMAN X Kota
Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 17 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D



Sekretaris
Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si.

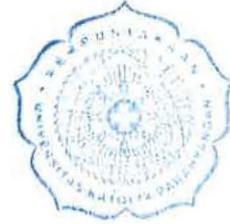


Anggota
Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tanty Tresnasari
NPM : 2013310044
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 361
Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi di SMAN X Kota
Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Januari 2017


METERAI
TEMPEL
NO. 48732A1EF406534759
6000
ENAM RIBURUPIAH
Tanty Tresnasari

Abstrak

Nama : Tanty Tresnasari

NPM : 2013310044

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Bandung No 361 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi Di SMAN X Kota Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur afirmasi di SMAN X Kota Bandung, berdasarkan perspektif ketidakpatuhan dari kelompok sasaran dari *Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari 64 keluarga yang anaknya diterima di SMAN X Kota Bandung melalui jalur afirmasi. Wawancara mendalam dengan beberapa keluarga dari siswa dilakukan untuk memperkuat hasil kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang diterima melalui jalur afirmasi tidak semuanya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan walikota. Mayoritas siswa yang diterima berasal dari keluarga yang tidak miskin. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan yang tinggi dan kemampuan yang tinggi digunakan bukan untuk mematuhi persyaratan tetapi untuk tidak mematuhi terutama dalam Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kemudian biaya sosial yang tinggi, legalistik aturan yang tinggi, pemantauan yang tinggi, pencegahan yang tinggi juga tidak menjamin kepatuhan namun yang terjadi adalah ketidakpatuhan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Siswa , Ketidakpatuhan

Abstract

Name: Tanty Tresnasari

NPM: 2013310044

Title: Implementation of Bandung Mayor Regulation Number 361 Year 2015 on the Implementation of the New Students Admission (PPDB) Affirmations in SMAN X Bandung.

The purpose of this study was to analyze the implementation of Regulation mayor of Bandung No. 361 Year 2015 on the implementation of the admission of new students (PPDB) through Affirmation in SMAN X Bandung, based on the perspective of non-compliance of the target group of the Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD , The method used in this research is quantitative descriptive questionnaire was used to collect quantitative data from 64 families whose children received at X SMAN Bandung through affirmations. In-depth interviews with some of the families of the students carried out to strengthen the results of the questionnaire.

The results of this research showed that students who are accepted through the affirmation is not all in accordance with the requirements based on the regulations of the mayor. The majority of students are accepted from families that are not poor. It is caused by high knowledge and high skills are used not to comply with the requirements but to disobey especially in the Certificate of Disadvantaged (SKTM). Then a high social cost, high legalistic rules, high monitoring high prevention does not guarantee compliance but what happens is non-compliance.

Keywords: Public Policy Implementation, Student, Non Compliance

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi Di SMAN X Kota Bandung”. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi Di SMAN X Kota Bandung ,dilihat dari perspektif ketidakpatuhan kelompok sasaran di terima dijalur afirmasi.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab keingintahuan penulis terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi Di SMAN X Kota Bandung .Manfaat dari skripsi ini tentu untuk memperkaya pengetahuan penulis di sektor Administrasi Publik, manfaat lainnya yaitu sebagai karya ilmiah yang dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan, serta dapat memberikan salah satu bahan masukan bagi semua pihak terkait dengan proses implementasi pelaksanaan PPDB di SMAN X yang diatur dalam Perwal No.361 Tahun 2015 yaitu pemerintah Kota Bandung, dan pihak sekolah terkait.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini dan tentunya dapat mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis terkait dengan administrasi publik di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, peneliti Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada penulis, kepada kedua orang tua penulis Muharam Nugraha dan Katijah, Kakak saya Denti Permata dan adik saya Kurnia Iqbal Fajari, serta keluarga besar lainnya yang menjadi motivasi terbesar kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Tutik Rachmawati, S.IP., M.A,Ph.D dan Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Segenap dosen pengajar, staf pelaksana, serta seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Segenap narasumber terkait dengan penelitian ini, yang telah memberikan informasi terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian.

5. Gusti Mulyadi yang selalu ada memberikan semangat dan motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan seperjuangan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Mila Nursidah, Raden Novy, Vijay Asti
7. Rekan di awal perkuliahan yang memberikan banyak pengalaman yaitu, Yara, Bulan, Silvia dan Erli Reski.
8. Rekan satu rumah KKL yaitu, Karisa, Andi Bulan, Rian Pandu, Kayshan, Dewi.
9. Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik (HMPSIAP) periode 2013-2014, dan 2014-2015 yang telah bekerjasama dalam melaksanakan program kerja kemahasiswaan untuk memajukan kegiatan mahasiswa administrasi publik di dalam maupun di luar UNPAR. Terutama Inkor yang sudah rela berbagi suka dan duka yaitu Gusti, Eka, Nicky, Monic, Ika, Jerry, Kayshan, Tasya dan Robby.
10. Teman dan keluarga besar Administrasi Publik dan FISIP UNPAR.
11. Semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penuliskan sebutkan satu persatu.

Bandung, 4 Januari 2017

Penulis,

Tanty Tresnasari

Daftar Isi

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar.....	Iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	2
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	2
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	7
2. Implementasi Kebijakan.....	9
2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	9
2.2 Definisi Implementasi Kebijakan.....	10
2.3 Pendekatan Implementasi.....	11
2.3.1 Top Down.....	12
2.4 Kepatuhan dan Ketidakpatuhan.....	14
2.4.1 Kepatuhan.....	15
2.4.2 Ketidakpatuhan.....	16
2.5 Sumber Ketidakpatuhan.....	16
2.5.1 Pengetahuan.....	16

2.5.2 Kemauan Kelompok Sasaran untuk Mematuhi Aturan	17
2.5.3 Kemampuan Kelompok Sasaran untuk Mematuhi Aturan....	23
2.6 Rumah Tangga Miskin.....	26
3. Metode Penelitian.....	28
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.2 Populasi.....	28
3.3 Pengukuran dan Instrumen Penelitian.....	29
3.3.1 Operasionalisasi Variabel.....	30
3.3.2 Skala Pengukuran.....	36
3.4 Validitas dan Reliabilitas.....	36
3.4.1 Uji Validitas.....	36
3.4.2 Uji Reliabilitas.....	39
3.5 Pengumpulan Data.....	42
3.6 Analisis Data.....	42
4. Profil Sekolah SMAN 6 Bandung.....	43
5. Implementasi Peraturan Walikota Bandung No 361 Tahun 2015 Tentang PPDB Jalur Afirmasi.....	50
5.1 Ketepatan Kelompok Sasaran.....	50
5.2 Sumber Ketidakpatuhan.....	55
5.2.1 Pengetahuan.....	55
5.2.2 Kemauan.....	58
5.2.3 Kemampuan.....	81
5.3 Kepatuhan Atau Ketidakpatuhan Pihak Sekolah.....	85
6. Kesimpulan dan Saran.....	88
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	89
Daftar Pustaka.....	90

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Item responden	36
Tabel 3.2	Uji Validitas alat ukur	38
Tabel 3.3	Uji Realibilitaas alat ukur	40
Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Tingkat Kemiskinan Kelompok Sasaran Berdasarkan Ekonomi.....	51
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Pemenuhan Persyaratan Afirmasi Oleh Siswa atau Keluarga Siswa yang Diterima Dalam Jalur Afirmasi.....	52
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keterangan Miskin dari Pemerintah Kota Bandung.....	53
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi Pengetahuan Kelompok Sasaran Terhadap Persyaratan Afirmasi.....	55
Tabel 5.5	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Kelompok Sasaran.....	57
Tabel 5.6	Tabel Silang Status Miskin dalam Database dan Kepemilikan SKTM.....	58
Tabel 5.7	Distribusi Frekuensi Biaya Sosial yang Digunakan Kelompok Sasaran untuk Memenuhi Persyaratan Afirmasi.....	59
Tabel 5.8	Distribusi Frekuensi Tingkat Penyediaan Biaya Sosial.....	60
Tabel 5.9	Tabel Silang Tingkat Kemauan Terhadap Biaya Sosial dengan Tingkat Kemiskinan Ekonomi (Penghasilan).....	61
Tabel 5.10	Distribusi Frekuensi Kelompok Sasaran Berdasarkan Legalistik Aturan.....	62
Tabel 5.11	Tabel Silang Tingkat Kesulitan untuk Memenuhi Persyaratan dengan Kemiskinan Menurut Database 2014 dan SKTM.....	64
Tabel 5.12	Distribusi Frekuensi Tingkat Legalistik Aturan.....	65
Tabel 5.13	Distribusi Frekuensi Kelompok Sasaran dalam Mengikuti Nilai dan Budaya yang Ada di Masyarakat.....	66
Tabel 5.14	Distribusi Frekuensi Tingkat Pelanggaran Terhadap Nilai dan Budaya.....	68
Tabel 5.15	Distribusi Frekuensi Kelompok Sasaran yang Mengikuti	69

	Konsultasi.....	
Tabel 5.16	Distribusi Frekuensi Tingkat Konsultasi.....	70
Tabel 5.17	Tabel Silang Kemiskinan (Penghasilan) dengan Konsultasi (Menghadiri Sosialisasi).....	71
Tabel 5.18	Tabel Silang Kemiskinan (Penghasilan) dengan Konsultasi (Informasi yang Sejelasnya).....	72
Tabel 5.19	Distribusi Frekuensi Kelompok Sasaran dalam Pemantauan yang Dilakukan oleh Pihak Pemerintah.....	73
Tabel 5.20	Distribusi Frekuensi Kelompok Sasaran Berdasarkan Verifikasi Status Miskin yang Dilakukan oleh Pemerintah.....	74
Tabel 5.21	Distribusi Frekuensi Tingkat Pemantauan.....	75
Tabel 5.22	Distribusi Frekuensi Kelompok Sasaran Dalam Hal Ketidakadilan Prosedural Saat Mendaftar di Jalur Afirmasi.....	76
Tabel 5.23	Distribusi Frekuensi Tingkat Ketidakadilan Prosedural.....	77
Tabel 5.24	Distribusi Frekuensi Kelompok Sasaran dalam Pencegahan.....	78
Tabel 5.25	Distribusi Frekuensi Tingkat Pencegahan.....	79
Tabel 5.26	Distribusi Frekuensi Tingkat Kemauan Kelompok Sasaran Mematuhi Perwal No 361 Tahun 2015 dan Memenuhi Persyaratan di Jalur Afirmasi.....	80
Tabel 5.27	Distribusi Kemampuan Kelompok Sasaran Terhadap Pemenuhan Persyaratan di Jalur Afirmasi.....	82
Tabel 5.28	Tabel 5.28 Distribusi Frekuensi Tingkat Kemampuan Kelompok sasaran.....	83
Tabel 5.29	Tabel Silang Kemiskinan (Penghasilan) dengan Tingkat Kemampuan.....	84
	...	
Tabel 5.30	Tabel Silang Kemiskinan (Pendidikan) dengan Tingkat Kemampuan dengan Pendidikan	84

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	27
----------------------------------	----

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Kuesioner.....	92
Lampiran 2 Bukti Telah Melakukan Penelitian.....	93
Lampiran 3 Hasil Kuesioner.....	94
Lampiran 4 Kartu Bimbingan.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”¹. Dengan kata lain kebijakan itu ada adalah untuk menjawab permasalahan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Namun pada kenyataannya pelaksanaan sebuah kebijakan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan dan bahkan menghadapi berbagai kesulitan.

Kesulitan yang sering dihadapi dalam melaksanakan suatu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan tingkat kompleksitas masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Seperti yang dikemukakan oleh Darwin bahwa ada kebijakan yang mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan². Menurut Darwin "karena itu, salah satu hal yang penting dalam studi implementasi adalah bagaimana mengenali tingkat kesulitan suatu kebijakan

¹ Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Abdul Wahab,1997.dalam “*Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*”, Jakarta:Bumi Aksara hal 65.

² Darwin,Muhadjir.1999, *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya

untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi"³. Pertanyaan yang sama ditegaskan pula oleh Edward III yakni "*what are the preconditions for successful policy implementation?*"⁴. Prakondisi-prakondisi yang dimaksud dapat berupa hambatan/kesulitan ataupun pendorong agar kebijakan dapat diimplementasikan.

Kelompok sasaran, birokrat, dan berbagai kondisi yang dapat menentukan tingkat implementasi kebijakan dihadapi juga di pemerintahan dan masyarakat kota Bandung. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015 tentang "*Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung no 177 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah*". Implementasi kebijakan ini perlu untuk dilakukan penelitian karena kebijakan ini diimplementasikan pada setiap tahun ajaran dan selalu ada perbaikan dalam aspek substansinya.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015 tentang "*Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung no 177 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah*". Perubahan tersebut berhubungan dengan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yaitu melalui jalur non akademis untuk

³ Darwin, Muhadjir. 1999, Ibid

⁴ Edwards III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press

afirmasi (Keberpihakan). Salah satu sekolah yang harus mematuhi peraturan tersebut yaitu SMAN X Kota Bandung. Jalur afirmasi dialokasikan untuk rumah tangga miskin secara ekonomi yang terdaftar dalam database penduduk miskin tahun 2014 kota Bandung, selain itu juga harus memenuhi salah satu persyaratan lainnya yaitu miskin secara ekonomi, anak yatim, piatu dan yatim piatu, warga sekitar yang memiliki MoU dengan pihak sekolah dan warga yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Sebanyak 20% dari seluruh pendaftar akan dialokasikan untuk jalur afirmasi ini dan tidak mempertimbangkan nilai Ujian Nasional dalam proses seleksinya⁵. Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar berdasarkan struktur kurikulum yang berlaku, serta kajian teknis lainnya.⁶ Pada kenyataannya pendaftar jalur afirmasi ini melebihi kuota daftar hal ini dimanfaatkan oleh pendaftar yang di duga tidak termasuk dalam keluarga miskin mendaftarkan diri pada jalur afirmasi, berikut merupakan indikasi masalah yang pertama berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah :

“Pendaftar di jalur afirmasi pada tahun ajaran 2015/2016 mengalami lonjakan melebihi dari pendaftar jalur akademis, hal ini disebabkan oleh keuntungan salah satunya pendaftar tidak perlu melampirkan nilai UN hanya dengan SKTM dan benar-benar termasuk keluarga yang miskin sesuai dengan ketentuan perwal yang mengaturnya. Lonjakan yang terjadi saat dua hari

⁵ Ibid

⁶ Peraturan Walikota Bandung No 361 Tahun 2015 poin C hal 2

menjelang berakhirnya batas pendaftaran, namun beberapa pendaftar ada yang mengundurkan diri dengan alasan tertentu. Lonjakan ini baru pertama kali terjadi dan cukup membuat pihak sekolah menggelar rapat mendadak.”⁷

“Calon siswa yang diterima di SMAN X sudah melalui beberapa tahapan pengecekan seperti kebenaran SKTM, dan survey ke rumah-rumah, namun untuk pengecekan terhadap database penduduk miskin tidak kami lakukan karena SKTM bisa mewakili dan menjadi bukti kuat untuk calon siswa yang telah mendaftar.”⁸

“saat kami menjadi panitia kami telah melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tanpa mengcrosscheck ke kelurahan setempat karena ada insiden lonjakan pendaftar di jalur afirmasi, sehingga kami hanya mengandalkan hasil keputusan rapat dari pihak sekolah. Pendaftar di jalur afirmasi sebelum ada yang mengundurkan diri yaitu 120 orang, namun ketika ada tindakan dari kepolisian untuk menyusut SKTM, hal ini menyebabkan pendaftarnya menyusut menjadi 76 pendaftar, dan kejadian ini murni dilakukan oleh pendaftar untuk mengundurkan diri.”⁹

Berdasarkan keterangan diatas pihak sekolah belum mematuhi untuk melakukan verifikasi pada SKTM secara mendalam sebagai bentuk kemauan pihak sekolah untuk memantau dan melakukan pencegahan terhadap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sehingga dilakukan tindakan oleh

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan wakasek F 43 tahun dan A 51 tahun di SMAN X Kota Bandung pada tanggal 30 Oktober 2016

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu NA, 46 thn, pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 09.45

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu L, 42 thn, pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 09.30

kepolisian untuk membantu pihak sekolah mengetahui kebenaran SKTM, hal tersebut dilakukan karena ada indikasi keterangan yang tidak benar dalam Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yaitu diduga orangtua siswa yang mendaftar tidak mematuhi ketentuan untuk memiliki SKTM. Indikasi masalah yang kedua yaitu ketidakpatuhan yang diduga dilakukan oleh orang tua siswa berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

“saya daftarin dulu aja anak saya di jalur afirmasi biar diterima di SMA X karena peluangnya besar dan ada jaminan dia bakal diterima juga, ya meskipun saya buat SKTM palsu ga apa-apa lah kan coba-coba siapa tau ada rejekinya”.¹⁰

*“ibu mah gatau apa-apa yang penting anak ibu bisa sekolah disini caranya mah ya pake SKTM aja meskipun sebenarnya ibu masih mampu biayai tapi kan kalo daftar di afirmasi gratis ya lumayan semoga aja diterima”*¹¹

Hal tersebut menarik diteliti lebih mendalam untuk mengetahui kelompok sasaran dan pihak sekolah tidak mematuhi ketentuan yang sudah ada. Untuk memahami kepatuhan atau ketidakpatuhan dari kelompok sasaran dan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru akan dijelaskan melalui pendekatan compliance dan penjelasan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menjelaskan bahwa ketidakpatuhan

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa di gg saleh timur (N, 37 N, 45, E 46) pada tanggal 1 Mei 2016

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa di gg saleh timur (R,34) pada tanggal 1 Mei 2016

berhubungan dengan pengetahuan, kemauan dan kemampuan kelompok sasaran dalam mematuhi sebuah aturan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan siswa tahun ajaran baru, khususnya di SMAN X Kota Bandung pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dengan bertolak pada identifikasi masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah siswa yang diterima melalui jalur afirmasi di SMAN X merupakan kelompok sasaran yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan ?
2. Apakah tingkat pengetahuan, kemauan dan kemampuan kelompok sasaran (orang tua siswa dan pihak sekolah) terhadap sebuah aturan menjadi faktor ketidakpatuhan keluarga siswa yang diterima pada jalur afirmasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan tingkat ketepatan kelompok sasaran yang diterima melalui jalur afirmasi sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dan mendeskripsikan tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan yang ditinjau dari pengetahuan, kemauan dan kemampuan kelompok sasaran untuk mematuhi atau tidak mematuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan pada peraturan walikota Bandung no 361 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sebagai masukan untuk SMAN X Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2015 berdasarkan kepatuhan dan ketidakpatuhan orang tua siswa yang mendaftar dijalur afirmasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK, menjelaskan mengenai kebijakan publik, implementasi kebijakan, kepatuhan dan ketidakpatuhan serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai rancangan penelitian, populasi dan sampel, pengukuran instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV PROFIL PENELITIAN ,DESKRIPSI menjelaskan mengenai profil dari SMA X dan menjelaskan karakteristik responden.

Bab V ANALISA DATA, menjelaskan implementasi peraturan Walikota Bandung No 361 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan.